

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Kesejahteraan Sosial

2.1.1 Pengertian Kesejahteraan Sosial

Konsep kesejahteraan sosial yaitu sebagai suatu bidang kegiatan yang melibatkan berbagai aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta guna membantu individu, kelompok maupun masyarakat untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah sosial yang terjadi serta meningkatkan kualitas hidup mereka. Ilmu kesejahteraan sosial berupaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang sistematis yang membahas tentang upaya-upaya untuk mencapai suatu kondisi yang makmur dan sejahtera.

Setiap manusia menginginkan untuk hidup sejahtera, sejahtera menunjukkan pada suatu keadaan yang serba baik atau suatu kondisi dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, damai dan sehat baik itu jasmani maupun rohani. Pencapaian suatu kondisi yang sejahtera ini tentu menjadi hal yang bagi sebagian orang sulit untuk mencapai kesejahteraan terutama bagi masyarakat yang memiliki kehidupan ekonomi yang rendah. Definisi kesejahteraan sosial menurut (Soeharto, 2009, 154) menyatakan “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

Berdasarkan definisi tersebut maka Kesejahteraan sosial merupakan keadaan untuk memenuhi semua kebutuhan sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik tanpa adanya halangan apapun fungsi sosialnya tersebut dapat juga berupa sosialnya serta mobilitas dalam kesehariannya.

Definisi yang tidaklah jauh berbeda juga dikemukakan pada Preconference working for the 15th international conference of social welfare (Sulistiati, 2004: 25) dalam Huda (2009: 73) bahwa:

Kesejahteraan sosial adalah keseluruhan usaha sosial yang terorganisir dan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf tercapai pula unsure kebijakan dan pelayanan dalam arti luas yang terkait dengan berbagai kehidupan masyarakat, seperti pendapatan, jaminan sosial kesehatan, perumahan, pendidikan, rekreasi budaya, dan lain sebagainya.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka kesejahteraan sosial merupakan suatu usaha sosial yang terorganisir dan memiliki tujuan utama untuk dapat meningkatkan keberfungsian sosial dalam masyarakat yang didalamnya juga terdapat suatu kebijakan-kebijakan dan pelayanan-pelayanan yang dapat membantu masyarakat untuk dapat meningkatkan taraf sosialnya mengenai pendapatan, pendidikan, sosial dan lain-lain.

Definisi kesejahteraan sosial tentunya sangatlah beragam, namun pada intinya seluruh definisi kesejahteraan sosial tersebut merujuk pada keberfungsian sosial yang terjadi dalam upaya untuk dapat meningkatkan kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat. Salah satu definisi yang juga tidaklah jauh berbeda dengan definisi kesejahteraan sosial yang telah dijelaskan diatas adalah definisi kesejahteraan sosial berdasarkan Undang-Undang No.6 tahun

1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial yang dikutip dalam Suharto (2014: 2) yang menyatakan bahwa:

Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak atau kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

Berdasarkan definisi tersebut, maka kesejahteraan sosial merupakan suatu tata kehidupan untuk dapat memenuhi seluruh kebutuhan-kebutuhan dasar bagi setiap warga masyarakat baik dalam hal jasmani, rohani maupun sosial sehingga diharapkan apa yang diinginkan oleh masyarakat untuk dapat berinteraksi sosial dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan tanpa adanya suatu permasalahan yang dapat mengganggu dalam keberfungsian sosialnya.

2.1.2 Tujuan Kesejahteraan Sosial

Tujuan kesejahteraan sosial berguna untuk mendorong masyarakat dalam mencapai suatu kondisi yang sejahtera dalam kehidupannya. Tujuan sangat berkaitan dengan perubahan-perubahan pada individu, kelompok dan masyarakat meliputi perubahan fisik, sosial, ekonomi dan mental dan yang saling berhubungan dengan pencapaian tujuan. Ilmu kesejahteraan sosial mempunyai tujuan dalam mencapai suatu pemberian bantuan. Menurut Fahrudin (2014: 10) menyatakan Kesejahteraan Sosial mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Pencapaian akan suatu keadaan yang sejahtera bagi setiap individu ini meliputi, kebutuhan-kebutuhan pokok dan kebutuhan pendukung lainnya yang berkaitan pula dengan lingkungan sosial individu yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dimana individu berada. Suatu lingkungan yang mendukung individu ke arah yang positif tentunya akan mempercepat individu untuk meningkatkan kualitas kehidupannya, sedangkan sebaliknya apabila lingkungan sosial individu yang tidak mendukung tentunya akan berdampak pada hal yang negative terhadap individu tersebut dan membuatnya semakin buruk dalam mencapai suatu keadaan yang sejahtera. Menurut Schneiderman (1972) dalam Fahrudin (2012: 10) mengemukakan tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang sampai tingkat tertentu tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial, yaitu pemeliharaan sistem, pengawasan sistem, dan perubahan sistem". Berikut penjelasan mengenai tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial:

a) Pemeliharaan Sistem

Pemeliharaan dan menjaga keseimbangan atau kelangsungan keberadaan nilai-nilai dan norma sosial serta aturan-aturan kemasyarakatan dalam masyarakat, termasuk hal-hal yang bertalian dengan definisi makna dan tujuan hidup; motivasi bagi kelangsungan hidup orang seorang dan kelompok; norma-norma yang menyangkut pelaksanaan peranan anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua, dan peranan pria dan wanita; norma-norma yang berhubungan dengan penyelesaian konflik dalam masyarakat, dan lain-lain.

b) Pengawasan Sistem

Melakukan pengawasan secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial. Kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi fungsi-fungsi pemeliharaan berupa kompensasi, sosialisasi, peningkatan kemampuan menjangkau fasilitas-fasilitas yang ada bagi golongan masyarakat yang memperlihatkan penyimpangan tingkah laku.

c) Perubahan Sistem

Mengadakan perubahan kearah berkembangnya suatu sistem yang lebih efektif bagi anggota masyarakat. Dalam mengadakan perubahan itu sistem kesejahteraan sosial merupakan instrument untuk menyisihkan hambatan-hambatan terhadap partisipasi sepenuhnya dan adil bagi anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan, pembagian sumber-sumber secara lebih pantas dan adil, dan terhadap penggunaan struktur kesempatan yang tersedia secara adil.

Tiga tujuan utama di atas, dapat dilakukan bilamana adanya kerja sama dari pemerintah, kalangan masyarakat serta pekerja sosial untuk bersama-sama membangun suatu tujuan dalam pencapaian kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Sehingga, hidup dalam kondisi yang sejahtera dapat dirasakan apabila kerja sama dari satu sama lain dapat berjalan dengan baik.

2.1.3 Fungsi-fungsi Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial selain memiliki tujuan untuk mencapai kehidupan yang layak bagi masyarakat, tentunya juga memiliki fungsi-fungsi yang sangat berkaitan erat terhadap keberfungsian sosial dalam kehidupan. Selain itu kesejahteraan sosial juga memiliki fungsi khusus yang berkaitan dengan penyesuaian sosial dan relasi sosial sehingga diharapkan peranan-peranan sosial yang terganggu karena adanya perubahan dapat kembali sesuai dengan apa yang diinginkan dan keberfungsian sosial masyarakat dapat kembali normal. Dikutip dalam Fahrudin (2012: 12) fungsi-fungsi dalam kesejahteraan sosial antara lain:

a. Fungsi Pencegahan (*preventive*)

Kesejahteraan ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.

- b. Fungsi Penyembuhan (*curative*)
- c. Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).
- d. Fungsi Pengembangan (*development*)
Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.
- e. Fungsi Penunjang (*supportive*)
Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sector atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.
Empat fungsi dalam kesejahteraan sosial berdasarkan yang dikemukakan oleh Friedlander dan Apte, bahwa fungsi-fungsi yang menunjang kesejahteraan sosial itu untuk membantu masyarakat dalam mengurangi masalah-masalah sosial yang terjadi baik itu ekonomi, sosial maupun dalam pendidikan, sehingga dengan melaksanakan fungsi-fungsi tersebut masyarakat sebagai suatu peranan yang dapat meningkatkan pembangunan kesejahteraan sosial.

2.1.4 Komponen Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial selain memiliki tujuan dan fungsi yang sangat penting bagi siapaun yang mempelajarinya, ternyata kesejahteraan sosial juga memiliki beberapa komponen-komponen yang tidak kalah jauh penting. Komponen-komponen tersebut menjadi suatu pembeda antara kesejahteraan sosial dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Dikutip dalam Fahrudin (2012: 16) komponen-komponen dalam kesejahteraan sosial antara lain :

1) Organisasi formal

Usaha kesejahteraan sosial terorganisasi secara formal dan dilaksanakan oleh organisasi/badan sosial yang formal pula.

2) Pendanaan

Tanggung jawab dalam kesejahteraan sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah melainkan juga tanggung jawab masyarakat.

3) Tuntutan kebutuhan manusia

Kesejahteraan sosial harus memandang kebutuhan manusia secara keseluruhan, dan tidak hanya memandang manusia dari satu aspek saja, hal inilah yang membedakan pelayanan kesejahteraan sosial diadakan karena tuntutan kebutuhan manusia.

4) Profesionalisme

Pelayanan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara professional; berdasarkan kaidah ilmiah, terstruktur, sistematis dan menggunakan metoda dan teknik-teknik pekerjaan sosial dalam praktiknya.

5) Kebijakan

Pelayanan kesejahteraan sosial harus ditunjang oleh seperangkat perundang-undangan yang mengatur syarat memperoleh, proses pelayanan dan pengakhiran pelayanan.

6) Organisasi formal

Usaha kesejahteraan sosial terorganisasi secara formal dan dilaksanakan oleh organisasi/badan sosial yang formal pula.

7) Pendanaan

Tanggung jawab dalam kesejahteraan sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah melainkan juga tanggung jawab masyarakat.

8) Tuntutan kebutuhan manusia

Kesejahteraan sosial harus memandang kebutuhan manusia secara keseluruhan, dan tidak hanya memandang manusia dari satu aspek saja, hal inilah yang membedakan pelayanan kesejahteraan sosial diadakan karena tuntutan kebutuhan manusia.

9) Profesionalisme

Pelayanan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara professional; berdasarkan kaidah ilmiah, terstruktur, sistematis dan menggunakan metoda dan teknik-teknik pekerjaan sosial dalam praktiknya.

10) Kebijakan

Pelayanan kesejahteraan sosial harus ditunjang oleh seperangkat perundang-undangan yang mengatur syarat memperoleh, proses pelayanan dan pengakhiran pelayanan.

11) Peran serta masyarakat

Usaha kesejahteraan sosial harus melibatkan peran serta masyarakat agar dapat berhasil dan member manfaat kepada masyarakat.

12) Data dan informasi kesejahteraan sosial

Pelayanan kesejahteraan sosial harus ditunjang dengan data dan informasi yang tepat. Tanpa data dan informasi yang tepat maka pelayanan akan tidak efektif dan tidak tepat sasaran.

2.1.5 Bidang – Bidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Dalam kesejahteraan sosial selain berfokus pada keberfungsian sosial yang terjadi di masyarakat, ternyata kesejahteraan sosial juga memiliki beberapa bidang-bidang pelayanan dalam usaha kesejahteraan sosial. Tentunya hal ini lebih menspesifikasi fokus-fokus pelayanan yang terdapat dalam ilmu kesejahteraan sosial, focus-fokus pelayanan dari beberapa cakupan yang terdapat dalam kesejahteraan sosial juga saling terkait erat antara satu dengan yang lainnya. Cakupan-cakupan tersebut antara lain terdiri dari :

- 1) Kesejahteraan anak dan keluarga
- 2) Kesejahteraan remaja dan generasi muda
- 3) Kesejahteraan orang lanjut usia
- 4) Pelayanan kesejahteraan sosial umum
- 5) Pelayanan rekreasional
- 6) Pelayanan sosial koreksional
- 7) Pelayanan kesehatan mental
- 8) Pelayanan sosial medis

- 9) Pelayanan sosial bagi penyandang cacat
- 10) Pelayanan sosial bagi wanita
- 11) Pelayanan sosial bagi perumahan dan lingkungan

2.2 Definisi Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial adalah suatu profesi yang memiliki kegiatan profesional dalam membantu individu, kelompok atau masyarakat untuk meningkatkan atau memulihkan kemampuan mereka. sehingga mereka dapat berfungsi sosial dan menciptakan kondisi sosial yang mendukung tujuan-tujuan ini. Pekerja sosial yang berusaha membantu mereka mencapai tingkat kesejahteraan sosial yang setinggi-tingginya. Definisi pekerjaan sosial menurut studi kurikulum yang disponsori oleh *the Council on Social Work Education* dalam tahun 1959 dalam Fahrudin (2012: 59) dinyatakan bahwa:

Pekerjaan sosial berusaha untuk meningkatkan keberfungsian sosial individu, secara sendiri-sendiri atau dalam kelompok, dengan kegiatan-kegiatan yang dipusatkan pada hubungan-hubungan sosial mereka yang merupakan interaksi antara orang dan lingkungannya. Kegiatan-kegiatan ini dapat dikelompokkan menjadi tiga fungsi: pemulihan kemampuan yang terganggu, penyediaan sumber-sumber individu dan sosial, dan pencegahan disfungsi sosial.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pekerjaan sosial ini ingin membantu individu-individu untuk memperbaiki keberfungsian sosialnya melalui suatu kegiatan dengan melakukan interaksi sosial satu sama lain, sehingga hubungan sosial mereka saling terjalin dengan baik di dalam lingkungan tempat individu itu berada. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan interaksi sosial ini guna membantu individu untuk menciptakan suatu

hubungan sosial yang baru, dimana hubungan yang sebelumnya terganggu baik itu karena kurangnya interaksi satu sama lain maupun faktor lainnya yang menjadikan hubungan tersebut menjadi renggang serta untuk menghindari berbagai macam kondisi-kondisi yang berkaitan dengan disfungsi sosial, seperti didalam suatu keluarga dimana seorang ayah yang harusnya mencari nafkah namun justru menjadi pengangguran karena kurangnya skill yang dimilikinya.

Pekerjaan sosial yang memiliki kemampuan untuk membantu individu-individu yang memiliki berbagai masalah menjadikan tugas sebagai pekerjaan sosial bertambah berat, namun dengan kemampuan yang dimilikinya dalam memberikan pertolongan pada orang lain, menjadikan seorang pekerjaan sosial sangat dibutuhkan keberadaannya. Pengertian pekerjaan sosial menurut Soetarso dalam Huraerah (2011: 39) bahwa:

Pekerjaan sosial sebagai suatu profesi pemberian bantuan yang dilaksanakan melalui pengembangan interaksi timbal balik yang saling menguntungkan antara orang lain dan lingkungan sosialnya untuk memperbaiki kualitas kehidupan dan penghidupan orang tersebut sebagai suatu kesatuan harmonis yang berlandaskan hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Soetarso mengemukakan bahwa pekerjaan sosial sebagai suatu profesi dengan memberikan bantuan melalui pengembangan-pengembangan interaksi sosial yang memiliki hubungan timbal balik satu sama lain, dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas kehidupan individu, kelompok maupun masyarakat dalam suatu kesatuan yang harmonis dan dapat mengembalikan keberfungsian sosial dari masing-masing individu.

2.2.1 Fungsi Dasar Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial adalah suatu aktivitas profesional untuk membantu individu, kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan keberfungsian sosial mereka. Untuk mencapai itu semua pekerjaan sosial memiliki fungsi-fungsi dasar pekerjaan sosial. Fungsi dasar pekerjaan sosial menurut Max Siporin dalam Huraerah (2008: 39) adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan akses (access services), mencakup pelayanan informasi, rujukan, advokasi, dan partisipasi. Tujuan membantu orang agar bias mencapai atau menggunakan pelayanan-pelayanan yang tersedia.
- b. Pelayanan terapis, pertolongan, dan rehabilitasi, termasuk di dalamnya perlindungan dan perawatan pengganti, seperti pelayanan yang diberikan oleh badan-badan yang menyediakan konseling, pelayanan kesejahteraan anak, pelayanan pekerjaan sosial medis dan sekolah, program-program koreksional, perawatan bagi orang-orang usia lanjut (jompo), dan sebagainya.
- c. Pelayanan sosialisasi dan pengembangan, seperti KB (keluarga berencana), pendidikan keluarga, pelayanan rekreasi bagi pemuda, pusat kegiatan masyarakat, dan sebagainya.

Fungsi-fungsi dasar pekerjaan sosial tersebut dengan memberikan pelayanan-pelayanan sosial kepada individu, kelompok, dan masyarakat. Pelayanan-pelayanan sosial tersebut membantu mereka untuk mencegah, memperbaiki masalah sosial yang terjadi, dan juga meningkatkan taraf kehidupan mereka. Fungsi dasar pekerjaan sosial ini memberikan tujuan

kepada individu, kelompok, dan masyarakat sehingga mereka dapat berfungsi kembali di masyarakat dan kesejahteraan sosial mereka dapat tercapai.

2.2.2 Tujuan Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial di dalam melaksanakan kegiatan profesionalnya memusatkan perhatian pada keberfungsian sosial individu, kelompok dan masyarakat. Lingkungan dan interaksi sosial mereka juga tak luput dari perhatian pekerjaan sosial. Hal itu agar semua aspek kehidupan individu, kelompok, dan masyarakat dapat benar-benar berfungsi kembali. Selain fungsi-fungsi dasar pekerjaan sosial, pekerjaan sosial juga memiliki tujuan yang perlu dicapai, Iskandar (2013: 29) mengemukakan tujuan pekerjaan sosial sebagai berikut :

1. Menolong orang-orang dalam memperluas kompetisi dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi dan mengatasi masalah-masalah, untuk itu perlu dilakukan dengan:
 - a) Membantu kelayan untuk melihat kesulitan-kesulitannya dengan ketulusan,
 - b) Mempertimbangkan berbagai alternative penyembuhan,
 - c) Memelihara kesadaran kelayan akan kekuatan-kekuatan dan kemampuan-kemampuannya dan menggali serta memanfaatkan sumber-sumber pemecahan masalah,
 - d) Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran diri, mengajarkan strategi pemecahan masalah dan keterampilan hubungan antar pribadi, dan sebagainya.

2. Membantu orang mencapai sumber-sumber pelayanan sosial, baik sebagai perantara untuk menghubungkan antara orang dengan sumber-sumber yang tersedia dan dapat dimanfaatkan dalam memecahkan suatu permasalahan, maupun sebagai orang yang dapat membantu menciptakan sumber pelayanan yang baru serta melakukan koordinasi antara pemerintah dan anggota suatu kolektivitas tertentu maupun masyarakat secara keseluruhan.
3. Mengusahakan agar organisasi-organisasi pelayanan sosial menjadi semakin responsive terhadap permasalahan dan kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh individu.
4. Mendorong terjadinya interaksi-interaksi yang konstruktif antara individu dalam lingkungannya. Hal ini dapat dicapai dengan:
 - a) Meningkatkan dan memperbaiki komunikasi di dalam lingkungan keluarga,
 - b) Membantu suatu kelompok agar dapat memberikan dukungan penuh bagi para anggotanya, dan lain sebagainya.
 - c) Mempengaruhi hubungan antara badan-badan sosial pemerintah dan swasta sehingga terjadi kekuatan interaksi di dalam sistem ini.
 - d) Mempengaruhi kebijakan sosial maupun lingkungan.

2.2.3 Tahap-tahap Intervensi Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial dalam melakukan proses pertolongan kepada klien melalui tahapan intervensi. Tahapan ini digunakan untuk mengidentifikasi masalah, potensi, kebutuhan, dan sistem sumber yang ada dan dibutuhkan oleh

klien. Tujuan dari tahapan intervensi untuk mengembalikan keberfungsian sosial klien dan meningkatkan kesejahteraan sosial klien. Menurut Iskandar (2013: 59) tahapan intervensi pekerja sosial adalah sebagai berikut:

1) Tahap *Enggament, Intake* dan *Kontrak*

Tahap ini terjadi pertukaran informasi mengenai apa yang dibutuhkan kelayan, pelayanan yang dapat diberikan pekerja sosial dan lembaga sosial dalam membantu memenuhi kebutuhan kelayan atau memecahkan masalah kelayan. Di dalam kondisi seperti ini, terjadi proses saling mengenal dan tumbuhnya kepercayaan kelayan kepada pekerja sosial dan menciptakan relasi pertolongan yang baik berdasarkan profesional.

Setelah melakukan pengenalan terjadi suatu kontrak antara pekerja sosial dengan kelayan. Dimana kontrak merupakan kesepakatan bersama antara praktikan dengan kelayan yang di dalamnya dirumuskan tentang hakekat permasalahan kelayan, tujuan-tujuan pertolongan yang hendak dicapai, peranan-peranan dan harapan-harapan pekerja sosial dan kelayan, metoda-metoda yang digunakan serta peraturan-peraturan pertolongan lainnya.

2) Tahap *Assessment*

Tahap ini merupakan tahap pengungkapan masalah yang dapat diperoleh dengan mengumpulkan data-data yang ada. Di dalam *assessment* meliputi hal-hal seperti analisa struktur masalah kelayan, dan analisa struktur dinamika kepribadian kelayan. Data tersebut bisa didapat melalui wawancara, observasi, studi file-file, dan sebagainya.

3) Tahap *Planning of Intrevention*

Dalam tahap *planning of intervention* pekerja sosial merumuskan tujuan pemecahan masalah, sasaran perubahan, program dan langkah-langkah kegiatan pemecahan masalah, metoda-metoda yang akan digunakan. Di dalam *planning of intervention* ini mencakup seluruh rencana kegiatan yang akan dilakukan sehubungan dengan pemecahan masalah di dalam proses intervensi.

4) Tahap Pelaksanaan Intervensi

Pekerja sosial melaksanakan program kegiatan pemecahan masalah kelayan berdasarkan rencana intervensi yang telah dibuat. Dalam pemecahan masalah hendaknya pekerja sosial bekerja bersama-sama kelayan, bukan bekerja untuk kelayan, jadi melibatkan keaktifan dari kelayan. Hal ini sangat menentukan bagi keberhasilan intervensi, karena kelayan sendiri yang akan menentukan keberhasilan itu.

5) Tahap Evaluasi

Setelah melakukan intervensi, pekerja sosial mengadakan evaluasi terhadap hasil-hasil yang telah dicapai, serta kegagalan-kegagalan apa yang dialami dan hambatan-hambatan yang dihadapi. Tujuan hasil dan tujuan proses merupakan dua hal penting yang perlu mendapat evaluasi.

6) Tahap Terminasi dan Referral

Tahap terminasi dilakukan bilamana tujuan pertolongan telah tercapai, bilamana karena alasan-alasan rasional kelayan tidak mau melanjutkan proses pertolongan atau bilamana terjadi referral yaitu pemindahan terhadap pekerja sosial lain dikarenakan suatu alasan tertentu.

Tahap intervensi ini dilakukan jika ada klien yang memerlukan pertolongan atau jika ada suatu permasalahan sosial yang membutuhkan tahapan intervensi yang dilakukan pekerja sosial. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan siswa penerima bantuan program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Jika siswa memiliki permasalahan dalam bidang akademik, maka pekerja sosial dapat membantu. Karena pekerja sosial dalam setting pendidikan seharusnya ada tetapi di Indonesia masih belum banyak ditemukan. Tetapi pihak sekolah bisa memanggil pekerja sosial untuk menangani kasus yang ada di sekolah jika memang diperlukan.

2.2.4 Prinsip-prinsip Pekerjaan Sosial

Pada saat pekerja sosial memutuskan jenis kegiatan apa yang akan di ambil dalam suatu masalah tertentu, ada beberapa prinsip yang dapat dipakai:

1. Prinsip ekonomi, tindakan yang dipilih haruslah yang memakan waktu dan energy klien dan pekerja sosial yang sekecil-kecilnya.
2. Penentuan nasib sendiri, tindakan yang paling diharapkan oleh klien harus dilakukan kapanpun memungkinkan.
3. Individualisasi, tindakan apapun yang diambil harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik sistem klien.
4. Pengembangan, tindakan pekerja sosial tergantung pada tingkat perkembangan sistem klien.
5. Ketergantungan, tindakan pekerja sosial tergantung pada tindakan klien.

6. Focus pada tujuan pelayanan, seluruh tindakan harus berkaitan dengan tujuan-tujuan pelayanan sebagaimana telah dikembangkan oleh pekerja sosial dan klien selama tahap perencanaan.

The USA has been especially influential for the development of the discipline Social Work in Norway. Mary Richmond, who is seen as the founder of good social work (case work), published *Social Diagnosis* in 1917.

The two central topics there were:

- Clients and their problems have to be personalized, that is each individual has to be seen as unique and not treated as a category.
- Good social work (casework) requires thorough diagnosis.

(Strand and Siv 2014)

2.3 Tinjauan tentang Masalah Sosial

2.3.1 Pengertian Masalah Sosial

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang di Asia, tentunya banyak juga permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia. Tentunya permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia dapat disebabkan oleh banyak hal, tentunya hal tersebut dapat menyebabkan ketimpangan sosial sehingga dapat mengganggu dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Weinberg (1981: 4) dalam Sutomo (2010: 7), mendefinisikan masalah sosial adalah: “Situasi yang dinyatakan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai oleh warga masyarakat yang cukup signifikan, dimana mereka sepakat dibutuhkannya suatu tindakan untuk mengubah situasi tersebut”.

Berdasarkan definisi diatas bahwa masalah sosial yang terjadi akan berdampak pada terganggunya aktivitas ataupun yang lainnya dikarenakan satu dan yang hal lain yang menyebabkan tidak berjalannya mobilitas atau sosialisasi dengan normal sehingga merugikan bagi banyak orang dan mengganggu keberfungsian sosialnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan seorang pekerja sosial dan juga suatu kebijakan-kebijakan sosial yang dibentuk oleh pemerintah agar keberfungsian sosial yang sebelumnya terganggu dapat berjalan sebagaimana mestinya dan masalah-masalah sosial tersebut dapat teratasi.

2.3.2 Pandangan tentang Masalah Sosial

Dalam masalah sosial terdapat dua pandangan yang sangat berbeda, pandangan tersebut berasal dari persepsi yang dibedakan oleh kelas yang ada. Perbedaan persepsi tersebut tentunya menimbulkan pandangan yang berbeda antara keduanya, pandangan tersebut yaitu:

1. **Pandangan umum atau orang awam**

Pada pandangan ini orang awam atau umum cenderung menanggapi masalah sosial sebagai suatu yang berkenaan langsung dengan sendi kehidupan dirinya selaku anggota komunitas.

2. **Pandangan para ahli**

Pada pandangan ini para ahli cenderung menanggapi masalah sosial terjadi dikarenakan adanya faktor lain yang mendukung sehingga terjadi suatu permasalahan sosial.

2.3.3 Klasifikasi Masalah Sosial Berdasarkan Sumbernya

Masalah sosial timbul dikarenakan adanya nilai-nilai ataupun perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, dalam setiap masalah sosial tentunya terdapat juga sumber-sumber permasalahan yang akan tentu menjadi sosial juga memiliki kualifikasi-kualifikasi seperti yang dikutip dalam Soekanto (2012: 314) klasifikasi masalah sosial berdasarkan sumber-sumbernya, yaitu:

1. Ekonomis (contohnya adalah kemiskinan, pengangguran dan sebagainya)
2. Biologis (contohnya adalah penyakit)
3. Biopsikologis (contohnya adalah penyakit saraf, bunuh diri, disorganisasi jiwa)
4. Kebudayaan (contohnya adalah perceraian, kejahatan, kenakalan anak-anak, konflik rasial, dan keagamaan)

Berdasarkan klasifikasi-klasifikasi masalah sosial tersebut dapat dipahami bahwa masalah sosial memiliki berbagai macam klasifikasi-klasifikasi yang berdasarkan dengan berbagai sumber-sumber yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Tentunya hal tersebut menjadi suatu pembelajaran khususnya untuk pemerintah maupun warga Negara agar permasalahan sosial yang ada dapat diminimalisir.

Setiap manusia tentunya kewenangan untuk dapat melakukan kegiatan yang mereka inginkan. Namun, dibalik kewenangan tersebut tentunya mereka haruslah diiringi dengan persepsi yang baik dan juga sesuai dengan nilai-nilai

dan norma-norma yang ada. Hal ini dikarenakan setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh masing-masing setiap orang haruslah memikirkan juga mengenai dampaknya, tentunya sangatlah perlu persepsi yang baik untuk dapat mendorong dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang positif sehingga tidak ada dampak yang buruk yang akan diterimanya nanti. Persepsi seseorang merupakan salah satu faktor yang mendukung seseorang untuk dapat berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Menurut Mardikanto dan Soebiato (2017:82) mendefinisikan partisipasi adalah: “Partisipasi adalah bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dalam dirinya (intrinsik) maupun dari luar (ekstrinsik) dalam proses kegiatan berlangsung”.

Pengertian partisipasi menurut definisi diatas adalah keterlibatan seseorang atau kelompok secara sadar kedalam interaksi sosial secara aktif pada suatu situasi tertentu karena alasan dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok memahami suatu hal dalam pemikirannya melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kepatuhan dan tanggung jawab bersama.

Selain definisi tersebut, terdapat pula definisi partisipasi menurut Beal (1964) dalam Mardikanto dan Soebiato (2017: 80) yang mendefinisikan partisipasi adalah: “Partisipasi, khususnya partisipasi yang tumbuh karena pengaruh atau karena tumbuh adanya rangsangan dari luar, merupakan gejala

yang dapat diindikasikan sebagai proses perubahan sosial yang eksogen (*exogenous change*)”.

Berdasarkan definisi partisipasi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi sebagai proses akan menciptakan jaringan sosial baru yang masing-masing berusaha untuk melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan demi tercapainya tujuan akhir yang diinginkan masyarakat atau struktur sosial yang bersangkutan.

2.4 Definisi dan Tahapan Partisipasi

Definisi dan tahapan Partisipasi adalah inti dari sebuah program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Terdapat tiga alasan partisipasi masyarakat mempunyai peran sangat penting (Conyers, 1991) yakni:

- 1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat, karena tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
- 2) Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut.
- 3) Anggapan bahwa pelibatan masyarakat dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri merupakan suatu hak demokrasi.

Partisipasi terbagi atas beberapa tahapan (Cohen dan Uphoff, 1977), yaitu sebagai berikut:

- 1) Tahap pengambilan keputusan atau perencanaan, diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat. Tahap perencanaan yang dimaksud disini yaitu perencanaan dan pelaksanaan suatu program.
- 2) Tahap pelaksanaan merupakan tahap terpenting dalam pembangunan, sebab inti dari pembangunan adalah pelaksanaannya. Wujud nyata partisipasi pada tahap ini digolongkan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, sumbangan materi, dan tindakan sebagai anggota proyek.
- 3) Tahap evaluasi merupakan tahap yang dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini merupakan umpan balik yang dapat member masukan demi perbaikan pelaksanaan proyek selanjutnya.
- 4) Tahap menikmati hasil merupakan tahap yang dapat dijadikan indicator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek. Hal ini yang menjadi indikasi suatu proyek berhasil mengenai sasaran yaitu menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan yang menikmati manfaat suatu proyek.

Faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi beberapa faktor yang diduga behubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah antara lain:

- a) Usia. Orang tua memiliki sikap yang lebih kooperatif terhadap upaya pengurangan limbah (seperti daur ulang sampah) dibandingkan dengan anak muda (Matsumoto, 2011)
- b) Pendapatan. Terdapat korelasi positif antara tingkat pendapatan dan keterlibatan aktif masyarakat dalam program daur ulang, dimana masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan tinggi angkat terlibat lebih aktif dibandingkan masyarakat dengan tingkat pendapatan rendah (Ekere et al. 2009, dan sidique et al. 2010).
- c) Pendidikan. Ditemukan fakta bahwa masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi terlibat secara aktif dalam program daur ulang dibandingkan dengan masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah (Matsumoto. 2011). Tingkat pendidikan masyarakat berhubungan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah. Semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat mengenai pengelolaan sampah, maka akan semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat karena masyarakat semakin sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan di tempat mereka tinggal (Mulyadi et al. 2010).
- d) Ketersediaan waktu luang. Ketersediaan waktu luang rumah tangga untuk berpartisipasi dalam kegiatan daur ulang dan pemilahan berkaitan dengan anggota keluarga yang bekerja serta lamanya jam kerja (full-time atau parttime)

- e) Mempunyai sikap peduli lingkungan. Sikap peduli lingkungan menunjukkan keinginan dan kesadaran masyarakat untuk memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungannya.
- f) Faktor insentif ekonomi dari pemisahan sampah oleh rumah tangga akan mengasikkan partisipasi aktif masyarakat dalam memisahkan sampah di rumah. Insentif ini dapat diberikan dalam bentuk uang 19 bagi rumah tangga yang memilah sampah dan mengumpulkan sampah daur ulang terpisah seperti plastic, kaca, dan kertas. Bentuk insentif ini terbukti dapat meningkatkan partisipasi aktif dari rumah tangga sebesar 50 persen.

Secara harfiah, partisipasi berarti “turut berperan serta dala suatu kegiatan”, “keikutsertaan atau peran serta dalam suatu kegiatan”, “peran serta aktif atau proaktif dala suatu kegiatan”. Pengertian partisipasi menurut Sutrisno dalam Zulkarnin Nasution (2009) definisi partisipasi yaitu: “Pertama, partisipasi adalah dukungan masyarakat terhadap rencana/proyek pembangunan yang dirancang dan tujuannya ditentukan perencana. Kedua, partisipasi masyarakat dalam pembangunan, merupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai”.

2.4.1 Manfaat Partisipasi

Berbagai pengertian partisipasi yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dijelaskan bahwasanya partisipas merupakan suatu keterlibatan yang dilakukan dan juga tentunya diharapkan dapat bermanfaat dalam interaksi

sosial di masyarakat. Menurut Suratmo (1992) dalam Fahrudin (2012: 4) manfaat dari partisipasi yang akan dirasakan oleh masyarakat adalah:

1. Masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencana pembangunan di daerahnya, sehingga dapat mengetahui dampak apa yang akan terjadi baik yang positif maupun yang negatif, dan cara mengurangi dampak negatif yang akan dan harus dilakukan.
2. Masyarakat akan ditingkatkan pengetahuannya mengenai masalah lingkungan, pembangunan dan hubungannya, sehingga pemerintah dapat menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawabnya dalam pengelolaan hidup.
3. Masyarakat dapat menyampaikan informasi dan pendapatnya atau persepsinya kepada pemerintah terutama masyarakat di tempat proyek yang akan terkena dampak.
4. Pemerintah mendapatkan informasi-informasi dari masyarakat yang belum tahu atau tidak ada dalam laporan AMDAL, sehingga kebijaksanaan atau keputusan yang akan diambil akan lebih tepat, karena di dalam informasi tersebut sering pemerintah dapat menemukan masalah-masalah yang penting bagi masyarakat yang belum terekam dalam laporan AMDAL secara jelas terutama hal-hal yang tidak dapat dikuantitatifkan.
5. Apabila masyarakat telah mengetahui cukup banyak mengenai proyek tersebut termasuk dampak apa saja yang akan terjadi positif dan negatif dan usaha-usaha apa saja yang akan dilakukan untuk

mengurangi dampak negatif, sedang dari pihak pemerintah dan pemrakarsa proyek mengetahui pendapat-pendapat masyarakat serta keinginannya atau hal-hal apa yang diperlukan, sehingga salah paham atau terjadinya konflik dapat dihindari.

6. Masyarakat akan dapat menyiapkan diri untuk menerima manfaat yang akan dapat dinikmati dan apabila mungkin meningkatkan manfaat tersebut dampak positif dan ikut menekan atau menghadirkan diri terkena dampak negatif.
7. Dengan ikut aktifnya masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sejak tahap penyusunan amdal, biasanya perhatian dan instansi pemerintah yang bertanggung jawab dan pemrakarsa proyek pada masyarakat akan meningkat.

2.4.2 Faktor-Faktor dalam Partisipasi

Partisipasi yang terdapat dalam setiap orang tentunya terjadi dikarenakan adanya suatu persepsi atau pemikiran yang ada dalam dirinya. Selain itu, terdapat juga faktor-faktor dalam partisipasi. Menurut Sahidu (1998) dalam Fahrudin (2012: 44) faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemauan masyarakat untuk berpartisipasi adalah:

- a.) Motif harapan
- b.) Needs
- c.) Rewards, dan
- d.) Penguasaan informasi.

Faktor yang memberikan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi adalah:

- a.) Pengaturan dan pelayanan
- b.) Kelembagaan
- c.) Struktur dan stratifikasi sosial
- d.) Budaya lokal
- e.) Kepemimpinan
- f.) Sarana dan prasarana

Sedangkan untuk faktor yang mendorongnya adalah:

- a.) Pendidikan modal, dan
- b.) Pengalaman yang dimiliki.

Berdasarkan faktor-faktor partisipasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor tersebut terjadinya karena adanya keinginan dari setiap orang untuk berubah dan menghasilkan tujuan yang diinginkan, selain itu faktor tuntutan juga merupakan suatu hal yang menyebabkan seseorang untuk dapat berpartisipasi dan juga didukung oleh adanya *rewards* yang akan didapatkan.

2.4.3 Bentuk-bentuk Partisipasi

Menurut Dusseldorp, dalam buku Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik (2013: 84), mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa:

- 1) Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat

- 2) Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok
- 3) Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain
- 4) Menggerakkan sumber daya masyarakat
- 5) Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan
- 6) Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan dimasyarakatnya

2.4.4 Pendekatan Mengenai Partisipasi

Partisipasi yang terdapat dalam masyarakat tentunya memiliki beberapa ketentuan-ketentuan sesuai dengan norma-norma maupun nilai-nilai yang berlaku. Menurut Bumberger dan Shams (1989) dalam Fahrudin (2012: 36):

1. Partisipasi merupakan proses sadar tentang pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan dari masyarakat yang kurang beruntung berdasarkan sumber daya dan kapasitas yang dimilikinya.
2. Partisipasi harus mempertimbangkan adanya intervensi dari pemerintah dan LSM, disamping peran serta masyarakat. Hal ini sangat penting untuk implementasi proyek yang lebih efisien mengingat kualitas sumber daya dan kapasitas masyarakat tidak memadai.

2.4.5 Manfaat Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Partisipasi

Manfaat berpartisipasi dalam program bank sampah dirasakan oleh perusahaan Unilever dan nasabah bank sampah baik perumahan menengah maupun perumahan mewah. Manfaat yang dirasakan nasabah adalah efek

positif yang terjadi pada nasabah dalam hal sosial, ekonomi, lingkungan karena berpartisipasi pada program bank sampah, sedangkan manfaat pada perusahaan adalah efek balik yang diterima setelah berpartisipasi membina masyarakat pada program dari perusahaan. Penelitian hanya mengkaji manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dirasakan responden yang menjadi nasabah dari program bank sampah Rosella.

Manfaat sosial partisipasi dianalisis dengan metode statistic deskriptif. Data dikumpulkan lewat kuesioner yang berisi daftar pertanyaan mengenai resepsi nasabah dan manfaat yang dirasakan. Manfaat ekonomi partisipasi nasabah dibagi menjadi manfaat langsung dan tidak langsung yang dinikmati oleh nasabah. Manfaat langsung adalah manfaat yang dinikmati dari partisipasi sebagai nasabah yaitu dari saldo tabungan sementara manfaat tidak langsung adalah manfaat yang tidak langsung diterima dari program tetapi dari program lain lanjutan dari kegiatan bank sampah. Manfaat lingkungan dianalisis dengan pendekatan nilai pasar dari nilai perbaikan lingkungan dan pemanfaatan kembali sampah.

2.5 Tinjauan Tentang Bank Sampah

2.5.1 Definisi Bank Sampah

Bank sampah merupakan salah satu solusi dengan menangani permasalahan sampah-sampah yang sudah di pilah-pilah hasil dari pengumpulan. Hasil dari pengumpulan sampah, Bank sampah dikelola menggunakan sistem seperti perbankan yang dilakukan oleh petugas

sukarelawan. Bank sampah memegang peranan penting dalam mengaplikasikan salah satu aspek dari 3R yakni *recycle*. Tujuan bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.

Namun kebanyakan dari masyarakat masih memandang kurang menarik dan menjijikkan. Bahkan ada yang memandang mengelola sampah akan menimbulkan penyakit. TPS atau tempat pembuangan sampah pun sudah penuh, sehingga banyak masyarakat memilih TPS sebagai tempat pembuangan sampah organik maupun non organik. Maka masyarakat sekitar tercetuslah ide untuk membuat bank sampah dan mengandalkan nasabah dari masyarakat sekitar.

Timbunan sampah yang terus menumpuk akan berakibat buruk bagi kesehatan lingkungan serta menampung sampah yang terus menerus dihasilkan oleh masyarakat. Untuk itulah penanganan masalah sampah harus dimulai dari sumbernya. Bank sampah adalah suatu sistem pengelolaan sampah secara dipilih mana organik dan non organik, hal ini yang mendorong masyarakat untuk berperan serta aktif di dalamnya.

2.5.2 Nasabah Bank Sampah

Nasabah bank sampah adalah individu, komunitas atau kelompok yang berminat menabungkan sampahnya pada bank sampah. Individu biasanya perwakilan dari kepala keluarga yang mengumpulkan sampah rumah tangga. Komunitas/kelompok adalah kumpulan sampah dari satu lingkungan atau sampah dari sekolah-sekolah dan perkantoran.

2.5.3 Manajemen Bank Sampah

Cara menabung pada bank sampah adalah setiap nasabah mendaftarkan pada pengelola, pengelola akan mencatat nama nasabah dan setiap anggota akan diberi buku tabungan secara resmi. Bagi nasabah yang ingin menabung sampah, caranya cukup mudah, tinggal datang ke kantor bank sampah dengan membawa sampah, sampah yang akan ditabung harus sudah dipilah-pilah sesuai dengan jenisnya seperti kertas, plastik, botol, kaleng, besi, aluminium dan lainnya dimasukkan ke kantong-kantong yang terpisah.

Sampah yang akan ditabung harus dalam kondisi bersih dan kering. Petugas/Pembina bank sampah akan melakukan penimbangan, pencatatan, pelabelan dan memasukkan sampah pada tempat yang telah disediakan. Nasabah yang sudah menabung dapat mencairkan uangnya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati misalnya 3 atau 4 bulan sekali dapat mengambil uangnya. Sedangkan jadwal menabung ditentukan oleh pengelola. Pencatatan di buku tabungan akan menjadi patokan berapa uang yang sudah terkumpul oleh masing-masing nasabah, sedang pihak bank sampah memberikan harga berdasarkan harga pasaran dari pengumpulan sampah. Berbeda dengan bank pada umumnya menabung pada bank sampah tidak mendapat bunga. Untuk keperluan administrasi dan upah pekerja pengelola akan memotong tabungan nasabah sesuai dengan harga kesepekatan. Sementara itu, dana yang terkumpul akan dikelola oleh bendahara.

2.5.4 Peran Bank Sampah

Peran bank sampah terdapat dalam teori pertukaran. “Teori pertukaran menekankan pada sosiologi perilaku agar memusatkan perhatian pada hubungan antara pengaruh perilaku seorang aktor terhadap lingkungan dan dampak lingkungan terhadap aktor. Hubungan ini adalah dasar untuk mengkondisikan peran atau proses belajar yang melalui perilaku disebabkan oleh konsekuensinya. Teori ini berkembang pada *rewardsand punishment*. Bank sampah merupakan institusi lokal yang kekuasaannya tidak begitu besar. Bank sampah tidak dapat melakukan punishment kepada masyarakat, sehingga bank sampah harus menggunakan sistem rewards. Proses penyadaran lingkungan melalui tabungan sampah yang dinilai dengan uang atau Rupiah merubah paradigm masyarakat tentang sampah. Sampah yang seharusnya dibuang menjadi bermanfaat.

2.5.5 Jenis - Jenis Bank Sampah

Jenis-jenis sampah pada umumnya di Indonesia sangatlah beragam, jenis bank sampah ini dapat dilihat dari pengelola atau kepemilikannya. Berdasarkan profil bank sampah Indonesia 2012 bahwa kepemilikan bank sampah dapat dilihat dari pengelola yang di bawah oleh pemerintah, swasta, pendidikan dan masyarakat umum (individu). Dan pada umumnya bank sampah di Indonesia jenis kegiatan yang dihasilkan oleh bank sampah yaitu daur ulang dan kompos untuk sampah organik.

Disamping itu peran bank sampah menjadi penting dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis. Sampah rumah tangga yang mewajibkan produsen melakukan kegiatan 3R dengan cara menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sedikit mungkin, menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang dan diguna ulang dan/atau menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang dan diguna ulang.

2.5.6 Ketentuan Bank Sampah

Adapun ketentuan pelaksanaan bank sampah menurut Peraturan Menteri Negeri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 yaitu sebagai berikut:

a. Jam Kerja

Berbeda dengan bank konvensional, jam kerja bank sampah sepenuhnya tergantung kepada kesepakatan pelaksana bank sampah dan masyarakat sebagai penabung. Jumlah hari kerja bank sampah dalam seminggu pun tergantung, bisa 2 hari, 3 hari, 5 hari, atau 7 hari tergantung ketersediaan waktu pengelola bank sampah yang biasanya punya pekerjaan utama.

b. Penarikan Tabungan

Semua orang dapat menabung sampah di bank sampah. Setiap sampah yang ditabung akan ditimbang dan dihargai sesuai harga pasaran. Uangnya dapat langsung diambil penabung atau dicatat dalam buku rekening yang dipersiapkan oleh bank. Berdasarkan pengalaman selama ini, sebaiknya sampah yang ditabung tidak langsung diuangkan namun ditabung dan dicatat dalam

buku rekening, dan baru dapat diambil paling cepat dalam 3 bulan. Hal ini penting dalam upaya menghimpun dana yang cukup untuk dijadikan modal dan mencegah budaya konsumtif.

c. Peminjaman Uang

Selain menabung sampah, dalam prakteknya bank sampah juga dapat meminjamkan uang kepada penabung dengan sistem bagi hasil dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu.

d. Buku Tabungan

Setiap sampah yang ditabung, ditimbang, dan dihargai sesuai harga pasaran sampah kemudian dicatat dalam buku rekening (buku tabungan) sebagai bukti tertulis jumlah sampah dan jumlah uang yang dimiliki setiap penabung. Dalam setiap buku rekening tercantum kolom kredit, debit, dan balans yang mencatat setiap transaksi yang pernah dilakukan.

e. Jenis Sampah

Jenis sampah yang dapat ditabung di bank sampah dikelompokkan menjadi :

1. Kertas, yang meliputi Koran, majalah, kardus, dan duplek,
2. Plastik, yang meliputi plastic bening, botol plastic, dan plastic keras lainnya, dan
3. Logam, yang meliputi besi, aluminium, dan timah. Bank sampah dapat menerima sampah jenis lain dari penabung sepanjang mempunyai nilai ekonomi

2.5.7 Latar Belakang Yayasan PT Unilever Indonesia Tbk

PT Unilever Indonesia Tbk didirikan pada 5 Desember 1933 sebagai Zeepfabrieken N.V. Lever dengan akta No. 33 yang dibuat oleh Tn. A. H. Van Ophuijsen, di Batavia. Akta ini disetujui oleh Gubernur Jenderal Van Negerlandsch-Indie dengan surat No. 14 pada tanggal 16 Desember 1933, terdaftar di Raad Van Justitice di Batavia dengan No. 302 pada tanggal 22 Desember 1933 dan diumumkan dalam Javasche Courant pada tanggal 9 Januari 1934 Tambahan No. 3. PT Unilever Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi sabun, deterjen, margarin, minyak sayur dan makanan yang terbuat dari susu, es krim, makanan ringan dan minuman dari teh, dan produk-produk kosmetik. Merek-merek perawatan pribadi telah dikenal dan diakui di seluruh dunia seperti Axe, Citra, Pepsodent, Lifebuoy, Clear, Lux, Ponds, Rexona, Sunsilk, Rinso, Sunlight, Bango, Blue band, Royco, Sari Wangi, Taro, Walls.

PT Unilever Indonesia memiliki visi “Menjadi pilihan pertama bagi konsumen, pelanggan dan komunitas” dan misi “Meningkatkan vitalitas dalam kehidupan”. Misi Unilever dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Menjadi yang pertama dan terbaik di kelasnya dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi konsumen.
- 2) Menjadi rekan yang utama bagi pelanggan, konsumen dan komunitas.
- 3) Menghilangkan kegiatan yang tak bernilai tambah dari segala proses.
- 4) Menjadi perusahaan terpilih bagi orang-orang dengan kinerja yang tinggi.

- 5) Bertujuan meningkatkan target pertumbuhan yang menguntungkan dan memberikan imbalan di atas rata-rata karyawan dan pemegang saham.
- 6) Mendapatkan kehormatan karena integritas tinggi, peduli kepada masyarakat dan lingkungan hidup.

Yayasan Unilever Indonesia Unilever Indonesia membentuk Yayasan Unilever Indonesia pada tanggal 27 November 2000 sebagai perwujudan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan untuk berkembang bersama masyarakat dan lingkungan yang berkelanjutan. Perusahaan berupaya untuk memberikan kontribusi dalam pencapaian kualitas hidup yang lebih baik untuk menuju pertumbuhan bersama dengan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Pelaksanaan CSR PT Unilever Indonesia dinaungi oleh Yayasan Unilever Peduli, yang berada di bawah direktur Human Resources and Corporate Relations.

Misi dari Yayasan Unilever Indonesia adalah menggali dan memberdayakan potensi masyarakat, memberikan nilai tambah bagi masyarakat, memadukan kekuatan para mitra dan menjadi katalisator bagi pembentukan kemitraan. Pelaksanaan program Yayasan Unilever difokuskan pada program-program yang sesuai dengan visi, misi, prinsip bisnis perusahaan, serta program yang selalu melibatkan dan bertujuan pada masyarakat (Community Engagement). Program tersebut meliputi: pertama adalah Program Lingkungan (Environment Program) seperti Unilever Green and Clean yang telah dilaksanakan di beberapa kota besar di Indonesia.

Hingga saat ini program tersebut sudah dilaksanakan di Surabaya, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Banjarmasin, dan Makassar.

Kedua adalah Program Pengembangan Usaha Kecil Menengah. Sejak tahun 2000, perusahaan menjalin kerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta untuk mengembangkan suatu program dengan mengajak para petani lokal memproduksi kedelai hitam berkualitas. Adapun kedelai hitam tersebut merupakan salah satu bahan baku dari produk Unilever yaitu Kecap Bango. Ketiga adalah Program Promosi Kesehatan Terpadu. Unilever melakukan program CSR dalam bidang kesehatan melalui Program Promosi Kesehatan Terpadu (Integrated Health Promotion Program/IHPP).

Program ini merupakan inisiatif Unilever untuk menyatukan kegiatan-kegiatan promosi kesehatan yang telah dilakukan oleh berbagai pihak secara terpisah agar bersinergi. Dalam praktiknya, perusahaan menerapkan pendekatan integratif yang lebih menyeluruh sehingga memberikan dampak yang lebih besar kepada masyarakat. Program yang terakhir adalah Program Bantuan Kemanusiaan (Humanitarian Aid Program). Unilever berupaya menjadi perusahaan terpercaya, sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat untuk memenuhi tanggung jawab di tempat beroperasinya perusahaan.

Secara aktif, perusahaan berkolaborasi dengan berbagai organisasi dengan bertujuan untuk menjangkau lebih banyak daerah dan korban bencana. Unilever menjadi anggota forum antar organisasi seperti Indonesia Peduli,

Peduli Bengkulu dan Berbagi Untuk Indonesia, beberapa program kemanusiaan yang dilakukan Unilever yaitu: Can Do Aceh, Can Do Yogyakarta, Can Do Jakarta, dan Can Do Bengkulu.